PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

TRANSPARASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO

- Meinimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai bidang Pembangunan di Wilayah Daerah Kota Gorontalo, maka dipandang perlu adanya Transparansi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan bermasyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi tersebut, maka atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Gorontalo perlu mengajukan Peraturan Daerah tentang Transparansi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat didepan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 384 ;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) ;
12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang (Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor, 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dipemerintahan umum.
7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.

9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik dilingkung Pemerintahan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Gorontalo.
10. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
11. Rapat Kebijakan Publik adalah rapat dilingkungan Pemerintah Kota, DPRD, BUMD, BUM Unit vertikal organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Gorontalo.
12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun Opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.
13. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh pemerintah, dimana informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika ada peraturan yang melindunginya.
14. Badan Publik adalah penyelenggara kota ditingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Kota Gorontalo, Badan Hukum Milik Daerah, Organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dan anggaran negara (baik dan APBN, APBD atau non Budgeter), dan badan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dan pemerintah untuk menjalankan sebagai fungsi pelayanan publik.
15. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Kota Gorontalo.
16. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Komisi Transparansi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang di adukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
17. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.
18. Pemohon adalah setiap warga negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 2

Kewajiban meliputi :

- a. Informasi
- b. Prosedur
- c. Pengambilan kebijakan

Pasal 3
Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

Terdiri dari :

- 1) Setiap proses Perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya disampaikan informasinya secara aktif kepada masyarakat.
- 2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kota perencanaan tahunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota.
 - b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Kota, proses penganggaran sampai penetapan APBD.
 - c. informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan Tata ruang.
 - d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan kepada masyarakat.
 - e. Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit
 - f. Nama badan publik terkait.
 - g. Struktur dan fungsi Badan publik
 - h. Proses penjaminan dan yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan.
 - i. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan.
- 3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah